



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

MANAJEMEN RISIKO


SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2026


Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: Tahun 2026		
Periode yang Dinilai	: RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD Kota Denpasar		
Sumber Data	Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		
Sasaran Strategis	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%
	2	Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	91,18%
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100%
Tujuan, Sasaran, IKU, Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD		
	IKU Strategis: 1. Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan 2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD		
	Program: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		
 <p>Denpasar, 31 Desember 2025 Sekretariat DPRD Kota Denpasar</p> <p><u>Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM</u> NIP. 196811141998031003</p>			

Form 2.c.1
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: Tahun 2026		
Periode yang Dinilai	: RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD Kota Denpasar		
Sumber Data	Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		
Program Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <p>2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Utama:</p> <p>1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <p>2. Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</p> <p>7. Fasilitasi Tugas DPRD</p> <p>8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>9. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>12. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>13. Layanan Administrasi DPRD</p>		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
	2	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
	3	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%
	4	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
	5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%
	6	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%
	7	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%
	8	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%
	9	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%
	10	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%
	11	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
	12	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
	13	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <p>2. Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</p> <p>7. Fasilitasi Tugas DPRD</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <p>1. Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <p>2. Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>3. Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</p> <p>4. Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>5. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>6. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</p> <p>7. Persentase Fasilitasi Tugas DPRD</p>		
	<p>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>6. Layanan Administrasi DPRD</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <p>1. Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan</p> <p>2. Persentase Penatausahaan Administrasi Umum</p> <p>3. Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor</p> <p>4. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p> <p>5. Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>6. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD</p>		
<p>Denpasar, 31 Desember 2025</p> <p>Sekretariat DPRD Kota Denpasar</p>  <p>Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM</p> <p>NIP. 196811141998031003</p>			

Form 2.c.2
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Tahun Penilaian	: Tahun 2026		
Periode yang Dinilai	: RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD Kota Denpasar		
Sumber Data	Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		
Program Sekretariat DPRD Kota Denpasar (Renja Tahun 2026) dan Kegiatan Utama	<p>1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <p>2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Utama:</p> <p>1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <p>2. Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</p> <p>7. Fasilitasi Tugas DPRD</p> <p>8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>9. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>12. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>13. Layanan Administrasi DPRD</p>		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%
	2	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%
	3	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%
	4	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%
	5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%
	6	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%
	7	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%
	8	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%
	9	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%
	10	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%
	11	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
	12	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
	13	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>6. Layanan Administrasi DPRD</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <p>1. Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan</p> <p>2. Persentase Penatausahaan Administrasi Umum</p> <p>3. Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor</p> <p>4. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p> <p>5. Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <p>6. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD</p>		
	<p>Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <p>2. Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</p> <p>7. Fasilitasi Tugas DPRD</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <p>1. Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <p>2. Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <p>3. Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah</p> <p>4. Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>5. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</p> <p>6. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</p> <p>7. Persentase Fasilitasi Tugas DPRD</p>		
<p align="center">Denpasar, 31 Desember 2025 Sekretariat DPRD Kota Denpasar</p>  <p align="center">I. Gde Made Bhaju Pravita, MM NIP. 196811141998031003</p>			

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : Tahun 2026
 Periode yang dinilai : Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Risiko			Pemilik	Sebab			C/UC	Dampak					
		Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k					
Tujuan : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi															
Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD															
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Terjadinya keterlambatan dalam penyediaan dukungan administratif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RSO.26.34.03.01	Sekretaris DPRD	Kurangya keterampilan atau pemahaman pegawai mengenai prosedur fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Internal	C	Pelaksanaan dukungan administratif dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD tidak berjalan secara optimal	Sekretariat DPRD						
			RF.26.34.03.01							Sekretaris DPRD	Penyusunan anggaran berdasarkan data yang tidak lengkap atau tidak akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			RF.26.34.03.02							Sekretaris DPRD	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan DPRD	RSO.26.34.03.02	Sekretaris DPRD	1. Proses administrasi berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 2. Pegawai belum memiliki keterampilan atau pemahaman yang memadai terkait prosedur yang berlaku 3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih belum memadai 4. Kegiatan penguatan internalisasi di tiap unit kerja atau dialog kinerja tidak dilakukan secara rutin	Internal	C	Proses kerja mengalami hambatan dan efektivitas dalam memfasilitasi kegiatan menjadi berkurang	Sekretariat DPRD						
			RF.26.34.03.17							Sekretaris DPRD	Penyusunan anggaran berdasarkan data yang tidak lengkap atau tidak akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			RF.26.34.03.18							Sekretaris DPRD	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD

Denpasar, 31 Desember 2025
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : Tahun 2026
 Periode yang dinilai : Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
 Sasaran Strategis OPD : Meningkatkan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keutuhan	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD											
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pelaksanaan	Penyelesaian pembahasan ranperda tidak tepat waktu	ROO.26.34.03.01	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitasi penyusunan ranperda dan/atau rancangan peraturan DPRD	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.03	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.04	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pelaksanaan	Tidak Tercapainya Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD"	ROO.26.34.03.02	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Rendahnya perolehan nilai salah satu unsur komponen "Kompetensi Prilaku" karena kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitasi kegiatan tersebut	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.05	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penyusunan anggaran berdasarkan data yang tidak lengkap atau tidak akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.06	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Pelaksanaan	Tidak Tercapainya Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Fasilitas Fungsi Pengawasan DPRD", "Pelayanan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah"	ROO.26.34.03.03	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Rendahnya perolehan nilai salah satu unsur komponen "Kompetensi Prilaku" karena kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitasi kegiatan tersebut	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.07	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penyusunan anggaran berdasarkan data yang tidak lengkap atau tidak akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.08	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Pelaksanaan	Terjadi kesalahan prosedur dalam proses fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	ROO.26.34.03.04	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Kurangnya pemahaman pegawai terkait prosedur fasilitasi, termasuk informasi dan pemahaman mengenai prosedur serta perubahan kebijakan yang terkait	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.09	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Proses Penyusunan anggaran dilakukan tanpa didukung oleh data yang memadai atau tepat	Internal	C	Alokasi anggaran tidak sesuai prioritas dan kebutuhan organisasi	Sekretariat DPRD	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab				Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
												d
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.10	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan belum dilakukan secara optimal	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan	Tidak Tercapainya Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pelaksanaan Reses"	ROO.26.34.03.05	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Rendahnya perolehan nilai salah satu unsur komponen "Kompetensi Prilaku" karena kurangnya keterampilan atau pemahaman staf mengenai prosedur fasilitasi kegiatan tersebut	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.11	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Penyusunan anggaran berdasarkan data yang tidak lengkap atau tidak akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.12	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.26.34.03.06	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Tidak adanya pelanggaran kode etik DPRD	Eksternal	UC	Kegiatan berpotensi tidak dilaksanakan	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.13	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Penyusunan anggaran berdasarkan data yang tidak lengkap atau tidak akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.14	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.26.34.03.07	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Terbatasnya undangan pelatihan terkait prosedur fasilitasi bagi staf sehingga kurangnya informasi / pemahaman tentang prosedur dan perubahan kebijakan terkait	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD	
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.15	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.16	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.17	Sekretaris DPRD	Penyusunan anggaran berdasarkan data yang tidak lengkap atau tidak akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD	
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.18	Sekretaris DPRD	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab				Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CIUC	Uraian	Pihak yang Terkena
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	Pelaksanaan	Terjadinya kekurangan dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.26.34.03.08	Kabag Umum dan Keuangan	Perhitungan gaji dan tunjangan ASN yang tidak akurat	Internal	C	Keterlambatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.19	Kabag Umum dan Keuangan	Proses Penyusunan anggaran dilakukan tanpa didukung oleh data yang memadai atau tepat	Internal	C	Alokasi anggaran tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.20	Kabag Umum dan Keuangan	Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan belum dilakukan secara optimal	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Capaian kinerja penatausahaan administrasi umum tidak memenuhi target yang ditetapkan	ROO.26.34.03.09	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Kurangnya kompetensi atau pemahaman pegawai mengenai prosedur penatausahaan administrasi	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.21	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Proses Penyusunan anggaran dilakukan tanpa didukung oleh data yang memadai atau tepat	Internal	C	Alokasi anggaran tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.22	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan belum dilakukan secara optimal	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	Pelaksanaan	Pelayanan jasa penunjang kantor belum tersedia sesuai kebutuhan	ROO.26.34.03.10	Kabag Umum dan Keuangan	1. Pegawai belum memiliki kompetensi atau pemahaman yang memadai terkait adanya perubahan kebijakan 2. Penyelesaian daftar pembayaran jasa penunjang kantor tidak dilakukan tepat waktu.	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.23	Kabag Umum dan Keuangan	Proses Penyusunan anggaran dilakukan tanpa didukung oleh data yang memadai atau tepat	Internal	C	Alokasi anggaran tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.24	Kabag Umum dan Keuangan	Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan belum dilakukan secara optimal	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah	ROO.26.34.03.11	Kabag Umum dan Keuangan	1. Pemeliharaan barang milik daerah tidak memiliki jadwal dan prioritas yang jelas akibat perencanaan yang kurang sistematis 2. Ketetbatasan staf yang bertugas melakukan inventarisasi permasalahan barang milik daerah, sehingga barang milik daerah tidak dipelihara secara rutin	Internal	C	1. Menurunnya kinerja pemanfaatan BMD, karena barang tidak terpelihara dengan baik 2. Kerusakan atau penurunan nilai aset, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bagi daerah	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.25	Kabag Umum dan Keuangan	Proses Penyusunan anggaran dilakukan tanpa didukung oleh data yang memadai atau tepat	Internal	C	Alokasi anggaran tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pertanggungjawaban	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.26	Kabag Umum dan Keuangan	Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan belum dilakukan secara optimal	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitas penyediaan hak keuangan DPRD	ROO.26.34.03.12	Kabag Umum dan Keuangan	Kurangnya pemahaman pegawai mengenai peraturan dan prosedur fasilitas kegiatan tersebut	Internal	C	Penyediaan hak keuangan DPRD berpotensi tidak diberikan tepat waktu atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.27	Kabag Umum dan Keuangan	Proses Penyusunan anggaran dilakukan tanpa didukung oleh data yang memadai atau tepat	Internal	C	Alokasi anggaran tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.28	Kabag Umum dan Keuangan	Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan belum dilakukan secara optimal	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah	Sekretariat DPRD
	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target kinerja fasilitas kegiatan tersebut	ROO.26.34.03.13	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Terbatasnya undangan pelatihan terkait prosedur fasilitas bagi staf sehingga kurangnya informasi / pemahaman tentang prosedur dan perubahan kebijakan terkait 2. Kesulitan dalam memprediksi agenda DPRD untuk dapat difasilitasi kebutuhannya	Internal	C	Proses kerja menjadi terhambat dan kurang efektif dalam memfasilitasi kegiatan	Sekretariat DPRD
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.29	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Penyusunan anggaran tidak berdasarkan data yang lengkap atau akurat	Internal	C	Pelaksanaan pengelolaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.30	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Belum optimalnya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan	Internal	C	Adanya potensi kerugian keuangan daerah	Sekretariat DPRD



FORM 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian	: Tahun 2026				
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
		NIHIL			
II	Risiko Strategis OPD				
1	Terjadinya keterlambatan dalam penyediaan dukungan administratif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RSO.26.34.03.01	2	1	2
2	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan DPRD	RSO.26.34.03.02	2	1	2
III	Risiko Operasional OPD				
1	Penyelesaian pembahasan ranperda tidak tepat waktu	ROO.26.34.03.01	1	2	2
2	Tidak Tercapainya Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD"	ROO.26.34.03.02	1	2	2
3	Tidak Tercapainya Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD", "Pelayanan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah"	ROO.26.34.03.03	1	2	2
4	Terjadi kesalahan prosedur dalam proses fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	ROO.26.34.03.04	1	2	2
5	Tidak Tercapainya Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pelaksanaan Reses"	ROO.26.34.03.05	1	2	2
6	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.26.34.03.06	1	2	2
7	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.26.34.03.07	1	2	2
8	Terjadinya kekurangan dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.26.34.03.08	2	1	2
9	Capaian kinerja penatausahaan administrasi umum tidak memenuhi target yang ditetapkan	ROO.26.34.03.09	1	2	2
10	Pelayanan jasa penunjang kantor belum tersedia sesuai kebutuhan	ROO.26.34.03.10	1	2	2
11	Tidak tercapainya target kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah	ROO.26.34.03.11	1	2	2

		Analisis Risiko			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
12	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi penyediaan hak keuangan DPRD	ROO.26.34.03.12	2	1	2
13	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.26.34.03.13	1	2	2
IV	Risiko Fraud OPD				
1	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.01	2	1	2
2	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.02	2	1	2
3	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.03	2	1	2
4	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.04	2	1	2
5	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.05	2	1	2
6	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.06	2	1	2
7	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.07	2	1	2
8	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.08	2	1	2
9	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.09	2	1	2
10	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.10	2	1	2
11	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.11	2	1	2
12	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.12	2	1	2
13	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.13	2	1	2
14	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.14	2	1	2
15	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.15	2	1	2
16	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.16	2	1	2
17	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.17	2	1	2
18	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.18	2	1	2
19	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.19	2	1	2

		Analisis Risiko			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
20	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.20	2	1	2
21	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.21	2	1	2
22	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.22	2	1	2
23	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.23	2	1	2
24	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.24	2	1	2
25	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.25	2	1	2
26	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.26	2	1	2
27	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.27	2	1	2
28	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.28	2	1	2
29	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.29	2	1	2
30	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.30	2	1	2

Denpasar, 31 Desember 2025
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian : Tahun 2026
Tujuan Strategis : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	Renstra	d	e	f	g

NIHIL

Denpasar, 31 Desember 2025
Sekretariat DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

NIHIL

Denpasar, 31 Desember 2025
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

NIHIL

Denpasar, 31 Desember 2025
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar
Tahun Penilaian	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

NIHIL



Denpasar, 31 Desember 2025
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar
 Tahun Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
II	Risiko Strategis OPD									
1	Terjadinya keterlambatan dalam penyediaan dukungan administratif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	RSO.26.34.03.01	-							
2	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan DPRD	RSO.26.34.03.02	-							
III	Risiko Operasional OPD									
1	Penyelesaian pembahasan ranperda tidak tepat waktu	ROO.26.34.03.01	-							
2	Tidak Tercapainya Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS serta KUA dan PPAS Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan", "Pelayanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD"	ROO.26.34.03.02	-							
3	Tidak Tercapainya Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD", "Pelayanan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah"	ROO.26.34.03.03	-							

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
4	Terjadi kesalahan prosedur dalam proses fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD	ROO.26.34.03.04	-							
5	Tidak Tercapainya Survei Kepuasan Pelayanan "Pelayanan Pelaksanaan Reses"	ROO.26.34.03.05	-							
6	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.26.34.03.06	-							
7	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.26.34.03.07	-							
8	Terjadinya kekurangan dalam pembayaran gaji dan tunjangan ASN	ROO.26.34.03.08	-							
9	Capaian kinerja penatausahaan administrasi umum tidak memenuhi target yang ditetapkan	ROO.26.34.03.09	-							
10	Pelayanan jasa penunjang kantor belum tersedia sesuai kebutuhan	ROO.26.34.03.10	-							
11	Tidak tercapainya target kinerja pemeliharaan Barang Milik Daerah	ROO.26.34.03.11	-							
12	Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi penyediaan hak keuangan DPRD	ROO.26.34.03.12	-							
13	Tidak tercapainya target kinerja fasilitasi kegiatan tersebut	ROO.26.34.03.13	-							
IV	Risiko Fraud OPD									
1	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.01	-							
2	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.02	-							
3	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.03	-							

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
4	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.04	-							
5	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.05	-							
6	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.06	-							
7	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.07	-							
8	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.08	-							
9	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.09	-							
10	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.10	-							
11	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.11	-							
12	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.12	-							
13	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.13	-							
14	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.14	-							
15	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.15	-							

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
16	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.16	-							
17	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.17	-							
18	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.18	-							
19	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.19	-							
20	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.20	-							
21	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.21	-							
22	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.22	-							
23	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.23	-							
24	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.24	-							
25	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.25	-							
26	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.26	-							

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
27	Ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan anggaran	RF.26.34.03.27	-							
28	Penyusunan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan melampirkan bukti pengeluaran yang tidak valid	RF.26.34.03.28	-							
29	Penyusunan perencanaan anggaran yang kurang tepat	RF.26.34.03.29	-							
30	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.34.03.30	-							

Denpasar, 31 Desember 2025
 Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

